

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Perang Dingin berakhir pada 1991, Amerika Serikat menempati puncak piramida kekuasaan. Sebab demokrasi liberal yang disodorkan Amerika tak lagi memiliki lawan ideologis yang tangguh. Dua lawan ideologisnya pada abad ke-20, komunisme dan nasionalisme fasis, berhasil diruntuhkan. Imperium dan kediktatoran pun ikut tumbang. Demokratisasi kemudian marak di negara-negara yang sebelumnya otoriter di Amerika Latin, Eropa bagian Selatan, dan Eropa Timur, bahkan kini mulai merambah Asia Timur. Praktis semua negara menerapkan perekonomian pasar. Keterkaitan perekonomian global semakin kuat. Media massa dan budaya pop liberal asal Amerika sudah menjalar ke seluruh dunia. Kemenangan demokrasi liberal ini, begitu dikatakan Francis Fukuyama, telah mengantarkan dunia menuju gerbang “akhir sejarah”.¹

Dalam dunia yang seragam dengan akhir sejarahnya, para pendukung demokrasi liberal pun meyakini bahwa perang tidak lagi menjadi pilihan kebijakan dan telah menjadi ciri global. Satu buku ilmiah yang terbit pada 1990 menyimpulkan bahwa nasionalisme, yang biasa diartikan sebagai doktrin bahwa setiap kelompok budaya seharusnya punya negara sendiri, mulai cepat-cepat dibuang ke tong sampah sejarah, karena negara seperti itu sudah tidak sanggup

¹ Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*. Jakarta: KPG, 2003, h. 5; Mengenai ulasan akhir sejarah, lihat Francis Fukuyama. “The End of History?”, *the National Interest*, (Summer, 1989); dan buku utuh Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*. Penguin: 1992.

lagi menghadapi dunia yang saling tergantung. Sisa-sisa penghalang di jalan demokrasi liberal yang berjaya itu disingkirkan dengan bantuan seperangkat lembaga-lembaga internasional yang bersemangat – pasukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menjaga perdamaian, para ahli IMF (Dana Moneter Internasional) untuk menggiring berbagai negara masuk lingkaran demokrasi liberal dan melaksanakan kebijakan fiskal yang hati-hati.² Seirama dengan pemikiran itu, dan disertai keyakinan yang tinggi pada kebaikan demokrasi sebagai implikasi dari berakhirnya Perang Dingin, gagasan mengenai promosi demokrasi mulai dijadikan perhatian utama oleh para pembuat kebijakan luar negeri Amerika³ dan banyak negara lainnya.

Tuntutan demokratisasi di negara-negara yang masih menerapkan sistem otokrasi atau semi-demokrasi untuk menjadi negara demokrasi penuh kemudian menjadi fokus utama dari forum dan agenda internasional, seperti PBB dan forum demokrasi regional.⁴ Era ini menandai ditinggalkannya pendekatan tradisional realisme politik dalam kebijakan luar negeri dan melirik pendekatan idealisme politik dalam memandang cara kerja internasional.

Dengan begitu, demokrasi modern yang kini menjadi tuntutan global, telah terkait erat dengan diplomasi yang dibungkus di dalamnya. Itulah sebabnya,

² *Ibid*; Lihat juga argumen optimis liberal sejenis dalam John Mueller, *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*. New York: Basic Books, 1989; dan mengenai nasionalisme, lihat E.J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, Bab 6.

³ 1994 State of the Union Address, “Transcript of Clinton’s Address,” dalam New York Times, 26 Januari (1994), h. A17; William Clinton, *Confronting the Challenges of a Broader World*, Washington, D.C.: U.S. Department of State, 1993; “President and Prime Minister Blair Discussed Iraq, Middle East: November 2004,” <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/11/20041112-5.html> (diakses tanggal 13 November 2005).

⁴ Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian, “Indonesian Interests in Bali Democracy Forum”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 241 (5th International Conference on Social and Political Sciences/IcoSaPS, 2018), h. 49.

demokrasi sering digunakan sebagai citra diplomasi oleh negara dunia ketiga untuk memenuhi tuntutan zaman dan kepentingan nasional. Negara Dunia Ketiga yang belum memiliki kekuatan tradisional dalam politik internasional-nya menggunakan demokrasi sebagai pendukung sistem kekuatan politik dan ekonomi di arena internasional.⁵

Indonesia pun demikian. Sejak Suharto lengser pada 1998 akibat kepemimpinannya yang otoriter dan krisis ekonomi akut yang diwariskannya dan membuat rupiah terjun bebas, demokrasi dijadikan pilihan rasional bagi sistem politik Indonesia. Sejak pemilihan presiden langsung diadakan pada 2004 dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih, demokrasi pun kemudian dijadikan sebagai perangkat kebijakan luar negeri RI.

Dalam pandangan SBY, demokrasi bukan hanya soal Pemilu yang sukses. Demokrasi, baginya, perlu dikonsolidasikan dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karenanya, demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam nilai Pancasila perlu diproyeksikan dalam kebijakan luar negeri RI. Sejak saat itu, promosi demokrasi menjadi bagian integral kebijakan luar negeri RI, khususnya di kawasan Asia Pasifik.⁶

Namun dalam mempromosikan demokrasi, Indonesia tidak mengikuti kebijakan promosi demokrasi Amerika yang sifatnya memaksa melalui invasi militer (ambil contoh Irak). Indonesia lebih menekankan pentingnya bagaimana demokrasi dibangun dari dalam dan didasarkan pada: (i) Demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap perubahan politik harus merupakan pengalaman yang

⁵ *Ibid.*

⁶ “Why Do We Need To Have Bali Democracy Forum?”, <https://bdf.kemlu.go.id/about/why-bdf> (diakses tanggal 17 September 2020).

'berkembang dari dalam'. Hal ini perlu dibangun berdasarkan pengalaman sejarah serta keadaan budaya bangsa tersebut; (ii) Komunitas negara-negara di dunia; tanpa memandang kesamaan ideologis dan loyalitas politik mereka, dapat memahami dan mengembangkan cara pemerintahan agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan kedamaian yang lebih luas. Proses saling belajar dan bertukar pengalaman ini akan membuat demokrasi menjadi elemen yang menyatukan.⁷ Meski demokrasi dinilai dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan inklusif, tetapi ada anggapan yang menyebut tidak berarti proses tersebut lebih efektif. Dinyatakan bahwa tidak ada jaminan substansial bahwa demokrasi pasti dapat membawa hasil pembangunan yang lebih mapan, baik dalam hal stabilitas, kemakmuran, dan lainnya.⁸

Namun melalui proses belajar, dialog, dan berbagi pengalaman dalam hal membangun demokrasi, gagasan ini diharapkan bisa menemukan bentuknya yang sesuai dengan keinginan komunitas internasional. Oleh karena itu, pemerintah RI kini mulai menjadikan demokrasi sebagai satu kesatuan aspek untuk menunjukkan citra bangsa dan dalam rangka mencapai tujuan diplomasi. Dalam konteks inilah, Indonesia mulai menjadikan demokrasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Dan itu ditunjukkan pada saat Indonesia mengagas dibentuknya Bali Democracy Forum (BDF).

BDF merupakan sebuah forum tahunan yang melibatkan pemerintah, yang diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berkolaborasi

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dalam mengembangkan demokrasi, serta sebagai platform untuk mendukung demokrasi dan perdamaian sebagai cara untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar negara. Forum ini diselenggarakan setiap tahun pada bulan Desember di Bali, Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan dan membina kolaborasi baik di tingkat regional maupun internasional dalam bidang perdamaian dan demokrasi, serta mendorong dialog melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola keberagaman yang mendukung kesetaraan, pengertian, dan rasa hormat.⁹ Selama bertahun-tahun, cara tersebut dijadikan fondasi forum. Dalam upayanya selama bertahun-tahun itu pula, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai fokus utama dalam kawasan Asia-Pasifik. BDF memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan aspek politik, antara menciptakan kedamaian dan keamanan, serta mendukung penegakan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di wilayah tersebut, yang semuanya tertera dalam tiga pilar Piagam PBB.

Dengan kata lain forum ini terbuka bagi semua, sehingga ada kemungkinan untuk kehadiran negara-negara yang tidak mengikuti sistem demokrasi atau yang sedang dalam proses peralihan menuju demokrasi. Tidak hanya negara-negara dari Asia, tetapi negara-negara dari benua lain juga diperkenankan untuk hadir sebagai pengamat, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Austria, Belanda, dan Inggris. Selain para pemimpin negara, BDF juga

⁹ “Bali Democracy Forum”, <https://kemlu.go.id/amman/en/news/2595/bali-democracy-forum> (diakses tanggal 14 September 2020).

mengundang para ilmuwan, media, politisi, dan tokoh dari berbagai negara untuk menciptakan ide-ide demokrasi yang beragam dan solutif.

Promosi nilai-nilai demokrasi melalui BDF ini mengimplementasikan prinsip “demokrasi yang tumbuh dari dalam”. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah Indonesia, sebagai tuan rumah dan penggagas BDF, mengacu pada praktik nyata nilai-nilai demokrasi dari negara-negara peserta tanpa berpura-pura mengkritik atau membenarkan praktik tersebut. Dengan demikian, Indonesia tidak memaksa negara-negara peserta untuk mengakui praktik demokrasi yang diterapkan oleh negara lain sebagai standar ideal untuk berdemokrasi, sehingga mereka harus melakukan hal yang sama di negara mereka.¹⁰ Prinsip “demokrasi yang tumbuh dari dalam” inilah yang mungkin bersejalan dengan apa yang disebut sebagai teori perdamaian monadik (*monadic peace theory*),¹¹ salah satu varian dari teori perdamaian demokratis (*democratic peace theory*). Varian lainnya adalah teori perdamaian diadik (*dyadic peace theory*).

Dengan menjadikan teori monadik sebagai nilai-nilai promosi demokrasi, BDF secara praktik kemudian dikonstruksi (konstruktivisme) oleh para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia bersifat inklusif. Sebab demokrasi, kata Menlu Retno Marsudi, dapat mencapai keberhasilan ketika demokrasi terbuka dan semua orang mendapat peluang untuk terlibat dalam proses demokrasi.¹² Itu artinya

¹⁰ Vanny El Rahman, *Pengaruh BDF Terhadap Transisi Demokrasi Myanmar Periode 2012-2014*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017. h. 25.

¹¹ Teori ini menjelaskan bahwa negara demokrasi itu sejatinya tidak hanya berlaku damai dengan negara demokrasi lainnya, tetapi juga dengan negara non-demokrasi.

¹² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Merangkul Demokrasi Inklusif, Menlu Retno Buka Bali Democracy Forum ke-12*, 2019. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/854/berita/merangkul-demokrasi-inklusif-menlu-retno-buka-bali-democracy-forum-ke-12> (diakses tanggal 16 September 2020).

Indonesia sangat terbuka kepada semua negara yang ingin ikut andil dalam perhelatan BDF, tidak hanya kepada negara yang berciri demokrasi saja tapi juga yang non-demokrasi. Dengan begitu BDF akan menjadi gelaran forum perdamaian demokrasi yang inklusif, yang berisikan negara demokrasi atau pun negara non demokrasi.

Untuk membuat perhelatan BDF ini menjadi lebih operatif, pemerintah Indonesia secara bersamaan juga membentuk Institut for Peace and Democracy (IPD). Peran lembaga ini memberikan bantuan dalam bidang akademik dan teknis kepada BDF, melalui berbagai aktivitas seperti workshop, seminar, kuliah umum, kunjungan pemilu, pelatihan bagi pegawai negeri, serta memperluas jejaring. Dalam jangka panjang, IPD diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran demokrasi di tingkat regional maupun global.¹³

BDF pertama kali berlangsung di Bali pada tanggal 10-11 Desember 2008, diikuti oleh 32 perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik sebagai delegasi serta delapan perwakilan dari Eropa dan Amerika Serikat sebagai pengamat. BDF I, yang mengangkat tema "Membangun dan Konsolidasi Demokrasi: Agenda Strategis untuk Asia", bertujuan utama untuk memperkuat dan meneguhkan nilai-nilai demokrasi setelah krisis keuangan tahun 1997 yang berdampak pada beberapa negara di Asia. Dalam gelaran BDF ke-1 ini, Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar dan oleh orang luar. Ia harus tumbuh dan berkembang dari dalam. Untuk itu, agar demokrasi berjalan baik, ia membutuhkan akar yang kuat di antara kehidupan demokrasi.

¹³ Mohammad Anthoni, *Gagasan BDF Indonesia Tetap Relevan*, 2011, <https://www.antaranews.com/berita/288081/forum-demokrasi-bali-gagasan-indonesia-tetap-relevan> (diakses tanggal 14 September 2020).

Dalam pidato pembukaan pertemuan pertama BDF, Presiden SBY mengatakan,

“Dan sepanjang jalan, kami belajar banyak hal. Kami belajar bahwa pada kebangkitan dari setiap tantangan yang kami hadapi - baik itu terorisme, konflik etnis, atau krisis ekonomi - respons kami, naluri kami adalah untuk selalu memperkuat, bukannya mengurangi, demokrasi –yaitu apa yang kami sebut sebagai "respons demokratis (*democratic response*).”

Sejak 2008 hingga 2020, BDF setidaknya telah melakukan sebanyak tigabelas kali pertemuan dengan kenaikan jumlah delegasi. Dalam tiap pertemuan itu, BDF selalu memiliki tema berbeda dan makna yang berbeda pula. Mulai dari Pemerintahan Global, Pembangunan Ekonomi, Masyarakat Pluralistik, Pandemi Covid-19, hingga mengkritisi apakah nilai-nilai demokrasi yang telah digemakan tersebut sudah tersampaikan atau belum. Ini bisa menjadi cerminan bahwa Indonesia, yang mempunyai catatan merah tentang masalah kemanusiaan (HAM), kini berjuang untuk menjadi lebih demokratis dan beradab agar diterima dan memiliki lebih banyak tempat di antara negara-negara modern lainnya di dunia.

Pembentukan BDF ini terbilang unik. Sebab Presiden SBY memiliki latar belakang militer. Namun ia memiliki tingkat keteraturan yang lebih tinggi (dalam hal seremonial dan protokol) serta reputasi yang lebih baik (dalam hal posisi dan penghormatan). Hal ini tampak jelas dari caranya memprioritaskan kebijakan luar negeri berprofil tinggi dengan jargon "nol musuh, seribu teman" demi mencapai kepentingan nasional Indonesia selama era kepemimpinannya. BDF dijadikan oleh SBY sebagai salah satu ajang untuk memulihkan citra Indonesia yang buruk selama era Orde Baru, menaikkan posisi tawar, menggugah perhatian negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta menarik

perhatian negara-negara dunia ketiga yang terlihat melalui sikap netral dan mengedepankan isu kemanusiaan sebagai hal yang sangat penting.¹⁴

Alhasil BDF berhasil memperbaiki *image* dan keyakinan orang-orang terhadap Indonesia di tingkat global. Indikasi itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah partisipan BDF. Melalui BDF jugalah, Indonesia berhasil meningkatkan peringkat parameter demokrasi dari ke-110 pada tahun 2002 menjadi 60 pada tahun 2010.¹⁵ Meski mengalami pasang-surut peringkat demokrasi pada tahun-tahun setelahnya (2011-2020), BDF tetap dinilai berhasil meningkatkan iklim reformasi investasi Indonesia seperti kerjasama yang strategis dan mengubah cara pandang negara-negara maju terhadap Indonesia.¹⁶

Dengan sejumlah capaiannya itu, BDF tentu tidak begitu saja bisa bebas dari kritik. Terdapat banyak pihak yang mengkritik bahwa BDF belum menunjukkan hasil yang jelas, sebab masih berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan bukan sebagai tempat untuk mencapai kesepakatan yang mengikat. Walaupun niat BDF diharapkan dapat membantu memperkuat konsolidasi demokrasi di dalam negeri, kontribusinya saat ini masih dianggap terbatas. Selain dianggap sebagai alat pencitraan karena formatnya yang kurang mendukung dialog yang berarti, perwakilan masyarakat sipil di Indonesia juga menyatakan bahwa selama ini BDF lebih bersifat formal dan kurang melibatkan masyarakat sipil domestik secara nyata, karena lebih banyak mengundang mereka

¹⁴ Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian, *Op. Cit.*, h. 51.

¹⁵ Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2010: Democracy in Retreat", https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf (diakses tanggal 11 November 2019); Dyah Widiastuti, "Promosi Demokrasi dalam Kebijakan Luar Negeri dan Interaksinya dengan Konsolidasi Demokrasi Domestik Indonesia", *Jurnal Diplomasi* (2015) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

¹⁶ Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian, *Loc. Cit.*

sebagai peserta pasif di acara sampingan BDF yang disebut sebagai Civil Society Forum. Oleh karena itu, peran BDF dalam memperkuat demokrasi di dalam negeri masih dirasa sangat terbatas.¹⁷

Oleh karena itu, masyarakat sipil kemudian melakukan sebuah gerakan penting untuk membuat BDF berfungsi. Gerakan ini dilakukan pada perhelatan BDF 2014. Pada waktu itu, para wakil dari masyarakat sipil memiliki catatan khusus yang menarik perhatian para pemangku kepentingan. BDF 2014 menunjukkan interaksi yang menarik tentang bagaimana agenda promosi demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat memberikan dampak yang besar bagi konsolidasi demokrasi di dalam negeri. Kelompok masyarakat sipil yang mendukung demokrasi memanfaatkan kesempatan BDF 2014 untuk mengekspresikan keinginan mereka menolak sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung, sehingga suara mereka juga sampai ke tingkat internasional dan langsung disikapi oleh Presiden SBY melalui penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan sistem pilkada menjadi langsung. Dalam konteks ini, wakil masyarakat sipil berpandangan bahwa BDF telah menjadi “pelindung perjuangan demokrasi di dalam negeri”, karena meskipun masih bersifat formal, setidaknya BDF dapat menghasilkan konsekuensi moral, politik dan hukum bagi para pembuat kebijakan domestik.¹⁸ BDF 2014 itu menjadi ajang terakhir bagi SBY dan kepemimpinan SBY itu sendiri. Dengan keberhasilan SBY mempromosikan demokrasi melalui BDF itulah, Presiden

¹⁷ Dyah Widiastuti, *Op. Cit.*, h. 7.

¹⁸ *Ibid*, h. 7-8.

pengganti Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap mempertahankan gelaran forum ini.

Namun, di era Jokowi ini, BDF dinilai banyak ahli hubungan internasional kurang begitu terdengar gaungnya. Tidak seperti zaman SBY yang sangat terlibat dalam BDF, Presiden Jokowi tampaknya tidak begitu fokus dengan BDF. Pada pertemuan BDF ke-9 (2016), misalnya, Presiden Jokowi diketahui terlambat mengkonfirmasi kehadirannya, padahal rentang waktu penyelenggaraan kurang dari sebulan.¹⁹ Selain itu, pada Pertemuan BDF ke-10 di Banten, bukan Presiden Jokowi yang menyampaikan pidato dan membuka forum secara langsung dan resmi, melainkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

Namun jika dilihat dari analisis Idiosinkretisme, Presiden Jokowi sebetulnya tidak memiliki pandangan yang berbeda dari SBY mengenai BDF. Presiden Jokowi yang dikenal memiliki sifat sederhana dan lebih suka melihat ke dalam (*inward-looking*) dan rendah hati (*low profile* – sebagai kebalikan dari *high profile* SBY) tetap peduli dengan kerja sama internasional. Itulah sebab, Jokowi menginginkan BDF terus diadakan dan berupaya untuk membuat Indonesia tetap memiliki citra yang positif sebagai negara yang demokratis, beradab, dan terbuka kepada setiap negara.²⁰

Oleh karena itu, terlepas dari gaya kepemimpinan yang berbeda antara SBY dan Jokowi, hakikatnya kedua presiden itu, dalam hemat saya, memiliki

¹⁹ “Belum Pasti Datangi Bali Democracy Forum 2016, Perhatian Jokowi Dipertanyakan”, <https://news.okezone.com/read/2016/11/29/18/155421> (diakses tanggal 20 November 2020).

²⁰ Lihat Mangdar Situmorang, “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah pemerintahan Jokowi-JK”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 68 (2015).

perhatian yang sama dalam agenda BDF, yakni keinginan untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai perdamaian demokrasi. Sebagaimana SBY mengatakan bahwa, “demokrasi merupakan kunci mewujudkan perdamaian dan stabilitas internasional.”²¹ Sejalan dengan SBY, Jokowi juga menekankan, “demokrasi mampu berfungsi dengan efektif, mendukung ketenangan, harmoni, dan membawa kemakmuran bagi masyarakat”.²²

Dalam upaya mewujudkan perdamaian demokrasi yang dimaksud, SBY dan Jokowi memerlukan banyak agenda atau isu demokrasi yang mesti dikonstruksi dan didiskusikan dalam BDF tiap tahunnya. Ini sangat penting dilakukan agar negara-negara yang menganut sistem demokrasi, terutama negara yang tidak demokratis atau yang sedang berproses menuju demokrasi, dapat mempelajari cara-cara terbaik dalam berdemokrasi. Dengan cara ini, ada harapan untuk mewujudkan penerapan demokrasi di negara-negara yang belum demokratis atau yang sedang berusaha untuk menjadi demokratis.

Upaya ini bukan tanpa hasil. Selain dengan meningkatnya jumlah peserta negara di dalam forum, juga terdapat negara non demokrasi yang menginginkan BDF berperan dalam pembangunan demokrasi. Negara yang dimaksud adalah Myanmar. Negara yang masih dikuasai oleh junta militer itu diketahui terpikat dengan agenda demokrasi yang coba dikonstruksi oleh Indonesia melalui BDF. Terbukti Myanmar selalu ikut hadir dalam BDF sejak

²¹ Dikutip dari pemberitaan “Presiden SBY: Demokrasi Kunci Perdamaian Dunia”, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/456778-presiden-sby-demokrasi-kunci-perdamaian-dunia> (diakses tanggal 12 November 2019).

²² Dikutip dari pemberitaan “Buka Bali Democracy Forum ke-IX, Jokowi Bicara Soal Demokrasi dan Toleransi”, <https://news.detik.com/berita/d-3366188/buka-bali-democracy-forum-ke-ix-jokowi-bicara-soal-demokrasi-dan-toleransi> (diakses tanggal 12 November 2019).

forum ini dihelat pada 2008. Keterpikatan itu ditunjukkan Myanmar dengan meminta forum ini memberikan kontribusinya dalam mengubah sistem politik di negara itu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan BDF dan IPD segera mengambil langkah selanjutnya. BDF serta IPD aktif berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik di Myanmar. Selain itu, BDF dan IPD juga berhasil mendorong negara-negara demokratis lain seperti Australia dan Norwegia untuk berkontribusi dalam proses peralihan politik menuju demokrasi di Myanmar.. Kehadiran BDF dan rekan-rekannya dalam membantu transisi demokrasi di Myanmar menunjukkan bahwa Indonesia melalui BDF dan IPD telah berhasil memberikan kontribusi terhadap pembangunan demokrasi dan perdamaian demokrasi *per se* dalam artian monadik.

B. Masalah Penelitian

Pada dasarnya, penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, objek yang menjadi fokus harus sudah memiliki sebuah isu penelitian. Dalam kaitan itulah, mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian menjadi suatu keharusan.²³

Seperti yang sudah dibahas di latar belakang, bahwa agenda untuk mempromosikan demokrasi dalam kebijakan luar negeri telah menjadi pilihan yang diambil oleh para pembuat kebijakan di Indonesia selama dua belas tahun terakhir - baik di masa pemerintahan SBY atau pun di masa pemerintahan Jokowi.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1994, h. 60.

Ini bisa dilihat saat SBY membentuk Bali Democracy Forum pada 2008 dan terus berlanjut hingga 2014, serta kemudian diteruskan oleh presiden Jokowi (2015-sampai sekarang). Tujuannya untuk mendukung perbaikan demokrasi di dalam negeri, mendorong citra bangsa di mata dunia internasional, dan mewujudkan perdamaian demokrasi dalam artian monadik (kohesif terhadap negara demokrasi dan negara non demokrasi).

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian tesis ini terkait dengan agenda demokrasi seperti apa yang coba dikonstruksi Indonesia melalui BDF yang akan membuat negara-negara – khususnya negara non-demokrasi - terpikat pada forum tersebut dan akhirnya terwujud apa yang disebut sebagai perdamaian demokrasi dalam artian monadik. Dalam konteks itu, Myanmar menjadi uji kasus yang unik. Sebab sebagai negara junta militer, Myanmar terpikat pada BDF dan rutin mengahadirinya sejak forum itu pertama kali di diadakan pada 2008. Di sinilah kemudian Indonesia melalui BDF berperan penting dalam membantu proses transisi demokrasi di Myanmar. Merujuk paparan itu, maka identifikasi masalah dalam penelitian tesis ini adalah sejauh mana gagasan demokrasi yang dikonstruksi Indonesia melalui agenda BDF bisa membantu proses transisi demokrasi di Myanmar sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian demokrasi.

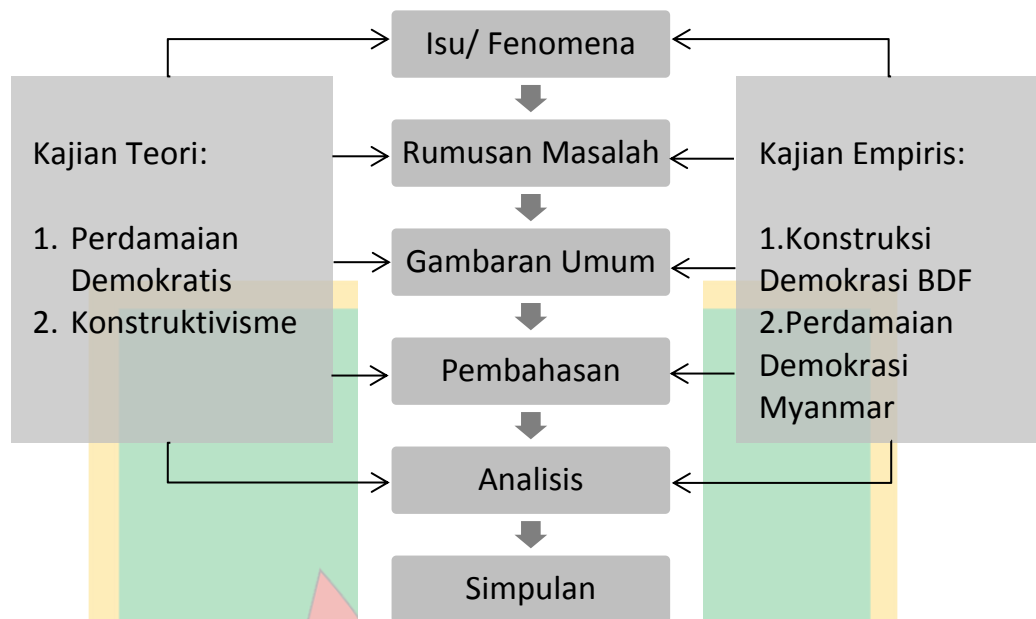
C. Pertanyaan Penelitian

Merujuk masalah penelitian di atas, ada dua pertanyaan penting yang ingin dijawab penelitian tesis ini.:

1. Apa agenda demokrasi yang coba dikonstruksi oleh Presiden SBY dan Jokowi dalam Bali Democracy Forum (BDF)?
2. Apakah hasil dari agenda BDF tersebut bisa mewujudkan perdamaian demokrasi?

D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan sintesis mengenai keterkaitan antara variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah dijelaskan, selanjutnya dianalisis dengan cara yang sistematis, sehingga menghasilkan rangkuman mengenai keterkaitan variabel tersebut. Hal ini adalah jaringan hubungan antara variabel yang dijelaskan secara logis, dikembangkan, dan dieksplorasi dari masalah yang telah diidentifikasi. Teori utama tesis ini adalah teori perdamaian demokrasi dan teori pendukungnya adalah pendekatan konstruktivisme. Teori-teori tersebut diterapkan untuk merumuskan masalah dalam studi tesis ini yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Setelah hasil penelitian telah didapatkan, tesis ini dapat menyimpulkan dan memberikan rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh peneliti di masa depan dalam mengembangkan penelitian serupa. Untuk penjelasan lebih lanjut, kerangka analisis dalam tesis ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I.1 Kerangka Analisis

E. Tujuan dan Manfaat

Seperti penelitian lain umumnya, penelitian tesis ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan di atas. Sementara manfaat penelitian ini selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S2 ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, serta menjadi nilai tambah bagi khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu hubungan internasional di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Ada sejumlah penelitian terdahulu terkait topik sejenis. Pertama adalah tesis yang ditulis oleh Fairuz Alhamdi berjudul, *Bali Democracy Forum as*

*Instrument in Enhancing the Image of Indonesia as the Role Model of Democratic Country.*²⁴ Dalam tesisnya itu, Fairuz memfokuskan penelitiannya dengan menggunakan teori standar dalam ilmu HI, yakni kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Dengan teorinya itu, Fairuz meneliti bagaimana perhelatan BDF ini dijadikan sebagai Instrumen kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai teladan negara demokrasi bagi negara-negara lainnya. Mengingat tesis Fairuz ini diajukan pada 2015, maka cakupan penelitiannya hanya sampai pada gelaran BDF 2008-2012 (periode SBY).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Moch Faisal Karim. Artikel yang dimuat jurnal ilmiah *The Pacific Review* ini mengambil judul, “Role Conflict and the Limits of State Identity: the Case of Indonesia in Democracy Promotion”.²⁵ Dalam artikelnya itu, Faisal Karim menganalisis mengapa Indonesia memproyeksikan demokrasi sebagai identitas negara dengan mengambil peran sebagai promotor demokrasi? Ia berpendapat bahwa aspirasi peran Indonesia sebagai promotor demokrasi bukanlah manifestasi budaya politik demokrasi yang tegas dan koheren, yang mana lebih cenderung menjadi ciri permanen negara. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai identitas negara mapan, identitas demokrasi Indonesia justru harus dilihat sebagai konsepsi peran yang diartikulasikan oleh elit-elit kebijakan luar negeri dalam usahanya mencari prestise internasional. Perannya sebagai penggerak demokrasi memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan konsepsi peran lainnya seperti pemimpin kawasan Asia Tenggara

²⁴ Fairuz Alhamdi, *Bali Democracy Forum as Instrument in Enhancing the Image of Indonesia as the Role Model of Democratic Country*. Cikarang: President University, 2015.

²⁵ Moch Faisal Karim, “Role Conflict and the Limits of State Identity: the Case of Indonesia in Democracy Promotion” *The Pacific Review*, Vol. 30, No. 3 (2017), h. 385–404.

sekaligus sebagai pembangun jembatan di tingkat global. Namun, Faisal Karim juga menunjukkan bahwa peran Indonesia sebagai promotor demokrasi juga terhambat karena konflik antar peran yang timbul dari diberlakukannya berbagai peran. Hasilnya, Pemberlakuan peran Indonesia sebagai penggerak demokrasi relatif kurang berdampak terhadap demokratisasi di kawasan. Untuk mendukung argumennya itu, Faisal Karim mengkaji strategi Indonesia dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia dalam tiga aspek studi kasus, yaitu peran Indonesia dalam meng-urus-utama-kan HAM di ASEAN, promosi demokrasi Indonesia melalui BDF, dan keterlibatan RI dalam upaya mendemokratisasikan Myanmar.

Ketiga, makalah yang ditulis oleh Jürgen Rüland pada 2015, berjudul “Democratizing Foreign Policymaking in Indonesia and Democratization of ASEAN: A Role Theory Analysis”.²⁶ Dalam makalahnya itu, Rüland mencoba mengurai upaya demokratisasi yang dilakukan Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar sejak itu. Rüland mengamati bahwa terdapat peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dibandingkan dengan era rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Indonesia pun kemudian menjadikan promosi demokrasi sebagai ciri khas kebijakan luar negerinya, terutama di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Dalam risetnya itu Rüland mencoba menjawab pertanyaan apakah dan, jika demikian, sampai sejauh mana Demokratisasi

²⁶ Jürgen Rüland, “Democratizing Foreign Policymaking in Indonesia and Democratization of ASEAN: A Role Theory Analysis”, *Southeast Asian Studies at the University of Freiburg Occasional Paper*, (Freiburg: Southeast Asian Studies, University of Freiburg, 2015), h. 1-24.

mengubah konsepsi peran kebijakan luar negeri Indonesia. Jawaban atas pertanyaan tersebut dilakukan Rüland melalui teori peran versi konstruktivis. Berdasarkan pidato para pemimpin politik Indonesia di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pernyataan utama kebijakan luar negeri di ranah domestik, Rüland menunjukkan adanya perubahan dalam gagasan peran dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ini menunjukkan bahwa di masa Reformasi, demokrasi telah menjadi elemen penting dalam pemikiran mengenai peran kebijakan luar negeri Indonesia, meskipun juga terdapat banyak elemen konsep peran lainnya seperti orientasi pembangunan, Worldisme Ketiga, orientasi perdamaian, dan peran mediator.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Mohamad Rosyidin, berjudul “Promoting a Home-grown Democracy: Indonesia’s Approach of Democracy Promotion in the Bali democracy Forum”.²⁷ Seperti halnya Faisal Karim dan Rüland, Rosyidin menilai bahwa demokrasi kini telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam pendekatan luar negeri Indonesia. Namun, Rosyidin lebih menyoroti sifat forum tersebut yang menurutnya bukanlah promosi demokrasi seperti yang dipraktikkan oleh Barat melalui cara kekerasan. Promosi demokrasi Indonesia menitikberatkan pada demokrasi yang tumbuh dari dalam. Rosyidin berpendapat bahwa BDF mewakili pendekatan orang Indonesia dalam promosi demokrasi yang berbeda dari negara Barat. Mempromosikan demokrasi yang tumbuh dari dalam negeri mewakili budaya toleransi dan harmoni yang menjadi ciri-ciri hubungan antarnegara bagian Asia, dan dibatasi oleh adanya norma

²⁷ Mohamad Rosyidin, “Promoting a Home-grown Democracy: Indonesia’s Approach of Democracy Promotion in the Bali democracy Forum”, *Asian Journal of Political Science*, Vol. 28, Issue 3 (Sep 2020), h. 1-22.

regional non-intervensi dengan menghormati urusan domestik masing-masing negara.

Kelima, buku yang ditulis oleh Asrudin Azwar.²⁸ Dalam buku itu, Asrudin mencoba meneliti implikasi dari teori perdamaian demokrasi dalam praktik kebijakan luar negeri negara-negara demokrasi. Kasus yang dianalisis adalah promosi demokrasi Amerika Serikat. Asrudin menilai bahwa promosi demokrasi yang dilakukan oleh negeri Paman Sam tersebut dalam mewujudkan perdamaian demokrasi pada kenyataannya jauh panggang dari api. Promosi demokrasi yang dilakukan dengan cara paksaan seperti yang pernah dilakukan Amerika terhadap Irak justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bukannya perdamaian demokrasi yang terwujud, melainkan peperangan demokrasi.

Lalu apa yang membedakan penelitian tesis saya dengan kelima penelitian terdahulu. Penelitian saya memang mengambil kasus Bali Democracy Forum, sama dengan keempat penelitian pertama yang saya singgung di atas. Namun bedanya tidak satu pun dari keempat penelitian itu yang menyinggung perdamaian demokrasi sebagai bagian dari tujuan utama Bali Democracy Forum. Keempat penulis itu hanya fokus pada bagaimana promosi demokrasi Indonesia melalui arena BDF bisa meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Itulah mengapa tidak ada satu pun yang menghubungkan teori perdamaian demokratik Immanuel Kant dengan interaksi negara-negara di dalam arena BDF. Dalam teori ini, Kant menghubungkan sistem politik republik (demokrasi) dengan perdamaian. Bagi Kant, konstitusi suatu negara, selain karena keaslian sumbernya (juga muncul dari

²⁸ Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratik: Asal-Usul, Debat, dan Problematika*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

keaslian mengenai gagasan hukum), (juga menawarkan harapan yang baik terhadap hasil yang diinginkan), yaitu perdamaian abadi.²⁹

Begitu pula penelitian terdahulu yang kelima. Perbedaannya ada pada studi kasus – tesis ini mengambil kasus promosi demokrasi Indonesia dalam arena Bali Democracy Forum, sementara penelitian yang satunya lagi mengambil studi kasus promosi demokrasi Amerika. Yang satu mengambil penjelasan monadik dalam teori perdamaian demokrasi, yang satu lagi mengambil penjelasan diadik dalam teori perdamaian demokrasi.

G. Kerangka Teori

1. Perdamaian Demokratis

Gagasan yang menyebutkan bahwa demokrasi bisa mewujudkan dan menciptakan perdamaian dalam literatur ilmu politik/hubungan internasional disebut sebagai *democratic peace theory* (teori perdamaian demokratik)- teori ini menyatakan bahwa tidak ada konflik yang muncul di antara negara-negara yang menganut sistem demokrasi.³⁰ Pendukung proposisi yang paling bersemangat dan idealis percaya bahwa bentuk-bentuk pemerintahan yang demokratis menumbuhkan budaya kesopanan politik, mempromosikan transparansi,

²⁹ Immanuel Kant, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”, <https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>; Untuk versi terjemahan Indonesianya, Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*. Jakarta & Bandung: Goethe Institut & Mizan, 2005, h. 50-51.

³⁰ Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratik: Asal-Usul, Debat, dan Problematika*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

pemerintahan yang bertanggung jawab, dan terjalannya ekonomi nasional sejauh yang menopang hubungan non-kekerasan antara sesama demokrasi.³¹

Teori ini bukanlah sebuah gagasan baru. Penghayat teori ini biasanya merujuk kepada esai panjang yang dituliskan oleh filosof asal Jerman Immanuel Kant pada 1795, *Perpetual Peace*.³² Gagasan Kant tentang demokrasi dan perdamaian ini kemudian dikaji kembali oleh teoretikus liberal Michael W. Doyle³³ dan diteruskan oleh para ilmuwan politik dan hubungan internasional yang didorong oleh berakhirnya Perang Dingin dan kemenangan nyata demokrasi liberal atas komunisme.³⁴ Teori ini semakin populer pada awal 1990-an dengan publikasi *Grasping the Democratic Peace*, karya dari ilmuwan politik Bruce M. Russett.³⁵

Karena teori perdamaian demokratik ini bermula dari gagasan politik Kant, maka pada bagian ini akan terlebih dahulu dijelaskan pemikiran politik filosof asal Jerman tersebut dan menjelaskan bagaimana teori ini dikembangkan di era politik kontemporer.

Pada dasarnya sebelum Kant mengutarakan gagasan idealisme politik perdamaian demokrasi, ia menilai bahwa persoalan politik manusia sesungguhnya

³¹ David Plotke, *Democracy and Boundaries: Themes in Contemporary American Politics*. Swedish Inst. for North American Studies, 2002, h. 100-102.

³² Immanuel Kant, 'Perpetual Peace: A Philosophical Sketch', <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm> (diakses tanggal 11 November 2019); Asrudin Azwar, "Memahami Visi Perdamaian Abadi Immanuel Kant", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (Parahyangan Center for International Studies/Universitas Katolik Parahyangan), Vol. 6, No. 1 (Maret 2010), h. 90-102.

³³ Michael W. Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs: Part 1," *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 12, No. 3 (Musim Panas, 1983); Michael W. Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs: Part 2," *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 12, No. 4 (Musim Gugur, 1983); Michael W. Doyle, "Liberalism and World Politics," *The American Political Science Review* Vol. 80, No. 4 (December 1986), h. 1151-1169.

³⁴ Francis Fukuyama, "The End of History?," *the National Interest*, No. 16 (Summer, 1989), h. 3-18; Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*. Penguin, 1992.

³⁵ Bruce Russett, *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post Cold World*. Princeton : Princeton University Press, 1993.

berakar dari nafsu kekuasaan (realisme politik). Dengan mengikuti logika berpikir politik realisme Hobbesian (1588-1679), Kant berpendapat bahwa manusia berasal dari dunia hewan. Pada mulanya, manusia hidup dalam keadaan yang masih sangat sederhana dan primitif, hampir seperti hewan. Pada masa itu, belum ada masyarakat yang teratur dengan sistem hukum yang berlaku. Kekuatan lebih dihargai daripada hukum, dan kekuasaan dikuasai oleh individu yang paling kuat. Oleh karena itu, konflik antara manusia segera muncul, dengan semua orang saling melawan. Desa bertikai dengan desa lain, klan berkonflik dengan klan lain, dan suku berselisih dengan suku lainnya, karena mereka belum mengakui eksistensi satu sama lain sebagai sesama manusia, dengan kesadaran yang sangat sempit pada saat itu.³⁶

Dari sini ide menulis *Perpetual Peace* muncul dibenak Immanuel Kant. Dalam tulisannya itu, Kant berupaya untuk mengembangkan satu rangkaian peraturan yang mampu menghentikan konflik di tingkat desa, kota, dan daerah. Dia berharap dari pemikirannya itu dapat terwujudnya Perdamaian Abadi melalui sebuah mekanisme yang dinamakannya republikan (demokrasi). Oleh sebab itu Kant mencoba merumuskan banyak hal dari essainya, mulai dari keadilan dan toleransi, etika dan politik, lembaga hukum dan tipe negara untuk hidup bermasyarakat, serta peran masyarakat dan pendirian hukum internasional di negara federal bebas sebagai syarat untuk menciptakan tata tertib internasional yang adil.

³⁶ Dr. P.A. Van der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, h. 92.

Mengingat keadaan global saat ini, tulisan Kant mengenai perdamaian memang sangat relevan. Sebab konflik bersenjata masih berlangsung di banyak tempat. Hal ini disebabkan karena perang adalah bagian dari kondisi alamiah manusia. Untuk itu, kondisi dunia yang damai, menurut Kant, harus diciptakan karena penting untuk menciptakan keamanan dari permusuhan yang mungkin timbul. Menurutnya, tidaklah cukup bagi manusia hanya dengan tidak melakukan suatu permusuhan; karena jika keamanan ini tidak dituangkan dalam perjanjian antara salah satu negara dan tetangganya (suatu hal yang hanya dapat terjadi dalam keadaan di mana ada hukum), masing-masing negara mungkin akan memperlakukan tetangganya, pihak yang dituntut untuk memberikan rasa aman ini, sebagai musuh.³⁷

Untuk alasan tersebut, Kant meyakini bahwa kemungkinan untuk mencapai perjanjian damai bisa saja dilakukan. Serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian diajukan oleh Kant. Dia berpendapat bahwa langkah awal yang harus diambil adalah setiap negara dalam sistem pemerintahan (konstitusi) seharusnya berbentuk republik. Dalam pasal definitif pertamanya yang terdapat dalam esainya, dia menyatakan bahwa 'Konstitusi sipil dari setiap negara seharusnya berbentuk republik (*The Civil Constitution of Every State should be Republican*)'. Konstitusi ini dibangun berdasarkan tiga pilar: pertama, berlandaskan pada prinsip kebebasan bagi setiap

³⁷ Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*. Jakarta dan Bandung: Goethe Institut Jakarta dan Mizan, 2005, h. 47-48. Lebih lanjut Kant mengatakan, 'kita biasanya beranggapan bahwa tidak seseorang pun yang boleh bertindak memusuhi orang lain kecuali jika ia telah secara aktif dilukai oleh orang tersebut. Maka, dalam kasus ini, kiranya sangatlah tepat jika keduanya diletakkan di bawah payung hukum sipil karena dengan masuk ke dalam keadaan demikian, mereka dapat saling memberikan keamanan yang dibutuhkan melalui kekuasaan atau hukum yang menguasai mereka berdua'.

individu dalam masyarakat (sebagai manusia); kedua, berfokus pada ketergantungan seluruh individu terhadap peraturan umum (masyarakat sebagai subjek); dan ketiga, berdasarkan kepada hukum yang menjamin kesetaraan hak (sebagai warga negara). Oleh karena itu, konstitusi republik, sehubungan dengan hukum, menjadi basis awal untuk semua jenis konstitusi sipil.³⁸

Lalu apa arti penting hubungan antara sistem republik dan perdamaian abadi yang dimaksud? Kant menjelaskan bahwa konstitusi republik, selain karena keaslian asalnya (juga lahir dari keaslian mengenai konsep hukum), (juga menawarkan kemajuan yang menjanjikan terhadap hasil yang diinginkan), yaitu perdamaian abadi (*eternal peace*).³⁹ Alasannya adalah :

“Ketika persetujuan masyarakat diperlukan untuk membuat keputusan mengenai pernyataan perang [dan ini merupakan satu-satunya opsi dalam konstitusi republik], adalah hal yang sangat wajar bagi masyarakat untuk sangat berhati-hati dalam memulai langkah menyedihkan seperti itu, yang mengarah pada kehancuran akibat perang. Kehancuran tersebut mencakup: kebutuhan untuk berperang, menanggung pengorbanan perang dengan sumber daya yang ada, memperbaiki kerusakan akibat dampak perang, serta melakukan tindakan yang merugikan, dengan membebani dirinya sendiri dengan utang nasional yang besar yang dapat mengganggu perdamaian itu sendiri dan tidak akan pernah bisa dihapus, karena perang akan selalu ada di masa depan”.⁴⁰

Teori Kant ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh sejumlah teoretikus politik/hubungan internasional kontemporer dengan menelisik proses pembuatan kebijakan luar negeri negara demokrasi. Dalam teori perdamaian demokratik, sebagaimana dijelaskan di atas, tidak adanya perang antara negara-

³⁸ *Ibid.*, h. 48-49.

³⁹ *Ibid.*, h. 50-51.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 51-52.

negara demokrasi itu sangat bergantung pada lembaga-lembaga demokrasi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana lembaga-lembaga demokrasi itu bisa memengaruhi kebijakan luar negeri negara demokrasi dan interaksi strategis antar negara-negara demokrasi? Jawaban atas pertanyaan teoretis itu akan membawa kita dalam memahami bagaimana kebijakan luar negeri negara demokrasi itu bekerja.

Sebagaimana diketahui para teoretikus politik/hubungan internasional dengan berbagai cara berpendapat bahwa demokrasi mampu membuat komitmen yang lebih kredibel untuk negara-negara lain karena lembaga-lembaganya. Dipaksa oleh aturan-aturan demokrasi untuk bekerja secara terbuka, para pemimpin perlu khawatir tentang ‘biaya penonton’,⁴¹ harga yang harus dibayar para pemimpin kepada konstituen karena melawan keinginan mereka. Salah satu penonton adalah kekuatan asing, yang menilai tujuan, niat dan kapasitas. Penonton lain adalah penonton dalam negeri, publik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan pemimpin dari jabatan atau mencegah mereka dari mencapai tujuan yang diinginkan. Akuntabilitas publik dalam demokrasi membatasi berbagai kemungkinan perilaku yang terjadi dalam otokrasi, di mana penguasa memiliki kendala langsung yang lebih sedikit. Pengamat eksternal karenanya dapat mengevaluasi masa depan sehubungan dengan biaya yang mereka pikir pemimpin tidak bersedia membayarnya. Lebih sulit dalam demokrasi untuk mengubah kebijakan dengan cepat, karenanya mereka lebih kredibel dalam

⁴¹ James D. Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes”, *American Political Science Review*, Vol. 88, No. 3 (1994), h. 577-592.

komitmen yang mereka buat.⁴² Demokrasi mungkin memakan waktu lebih lama untuk membuat keputusan, tetapi ia memiliki kestabilan lebih karena membutuhkan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat dalam proses persetujuan.

Namun ada anggapan yang mengatakan bahwa masalah biaya penonton membuat demokrasi kurang efektif dalam kebijakan luar negeri.⁴³ Tapi anggapan umum ilmuwan lain justru menyebutkan bahwa biaya penonton dapat memperkuat pemerintah dalam negosiasi kerjasama. Karena proses politik yang terbuka memperlihatkan permainan politik domestic, para pemimpin mampu menunjukkan secara meyakinkan ongkos mereka pada pembuatan konsesi.⁴⁴ Sebuah perjanjian mungkin lebih sulit untuk dicapai tetapi lebih kredibel sekali ditandatangani. Lisa Martin berpendapat, proses ratifikasi terbuka di Uni Eropa memberikan kekuatan yang lebih besar pada perjanjian daripada yang terjadi ketika mereka dilakukan oleh eksekutif dengan cara tertutup.⁴⁵

Karenanya, sebagaimana dikatakan teoretikus liberal berpengaruh Ludwig Von Mises, kaum demokrat liberal umumnya tidak akan mempertentangkan kebijakan dalam dan luar negeri. Meskipun di kemudian hari muncul pertanyaan yang membahas panjang lebar mengenai apakah kebijakan luar negeri lebih penting daripada kebijakan dalam negeri atau sebaliknya, bagi mereka, itu

⁴² Kenneth A. Schultz, "Do Democratic Institutions Constrain or Inform?: Contrasting Two Institutional on Democracy and War", *International Organization*, Vol. 53, No. 2 (1999), h. 233-266.

⁴³ Michael Crazier, Samuel P. Huntington, & Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press, 1975.

⁴⁴ Kenneth A. Schultz, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Lisa L. Martin, "The Influence of National Parliaments on European Integration", *Working Paper No. 94-100* (Cambridge, MA: Center for International Affairs, Harvard University, 1994).

hanyalah pertanyaan yang tidak terlalu serius. Karena demokrasi liberal pada dasarnya adalah ide yang bersifat global, dan gagasan yang ingin diimplementasikan di satu area tertentu juga relevan dengan wilayah lain yang lebih luas dalam konteks politik internasional. Jika para demokrat liberal memisahkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, hal tersebut hanya untuk mempermudah dan membuat kategori, agar permasalahan politik yang luas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar, bukan karena adanya keyakinan bahwa keduanya didasarkan pada prinsip yang berbeda.⁴⁶

Menurut Von Mises, Tujuan utama dari kebijakan domestik dalam demokrasi liberal sejalan dengan kebijakan luar negerinya, yaitu untuk mencapai perdamaian. Kebijakan luar negeri dari demokrasi liberal berfokus pada kolaborasi yang damai, baik di antara berbagai negara maupun di dalam satu negara. Dasar pemikiran dari demokrasi liberal berlandaskan pada pengakuan akan signifikansi kerjasama antar manusia, di mana semua kebijakan dan program yang diusung oleh demokrasi liberal dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara umat manusia. Sasaran utama yang dibayangkan oleh demokrasi liberal adalah terciptanya kerjasama yang ideal di seluruh umat manusia, yang berlangsung secara damai dan tanpa konflik. Pandangan demokrasi liberal memang mengakomodasi seluruh umat manusia, bukan hanya sebagian. Pemikiran ini tidak terbatas hanya pada kelompok kecil: tidak berhenti pada batasan desa, provinsi, negara, atau benua. Pemikiran ini juga bersifat kosmopolitan dan holistik, mencakup seluruh umat

⁴⁶ Ludwig Von Mises, *Liberalism: In the Classical Tradition*. New York: The Foundation for Economic Education, Inc., 1985.

manusia serta seluruh penjuru dunia. Dalam pengertian ini, demokrasi liberal merupakan sebuah bentuk humanisme. Sedangkan para penganut demokrasi liberal, sebagai warga global, dapat disebut sebagai kosmopolitan.⁴⁷

Di sini, Von Mises mencoba mengkritik mereka yang menganggap perang sebagai induk dari segala hal (asumsi realis). Kritik yang disampaikan oleh Mises berakar pada pemikiran bahwa perdamaian, bukan perang, adalah sumber dari segalanya. Satu-satunya faktor yang memungkinkan kemajuan manusia dan yang membedakan manusia dari hewan adalah kolaborasi sosial. Hanya kerja produktif yang menghasilkan kekayaan dan dengan demikian menyediakan fondasi fisik bagi pertumbuhan internal manusia. Menurut Von Mises, perang hanya mendatangkan kerusakan dan tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Perang, pembunuhan massal, kerusakan, dan kehancuran adalah aspek yang membuat kita serupa dengan hewan liar di hutan; sedangkan kerja konstruktif adalah ciri khas yang membedakan kita sebagai manusia. Kaum liberal menolak perang karena kenyataan bahwa perang tidak membawa keuntungan, tetapi malah menimbulkan kerugian.

Betapa berbahayanya pertikaian bagi kemajuan peradaban manusia menjadi terang saat seseorang menyadari keuntungan yang muncul dari distribusi tugas. Distribusi tugas mengubah orang yang terpisah menjadi individu yang bergantung pada orang lain, makhluk sosial yang telah dibahas oleh Aristoteles. Konflik antara satu hewan dan hewan lainnya, atau antara satu manusia liar

⁴⁷ *Ibid.*

dengan manusia liar lainnya, sama sekali tidak memengaruhi dasar ekonomi dari eksistensi mereka.

Persoalannya menjadi sangat berbeda ketika konflik yang harus diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer, muncul di tengah-tengah anggota komunitas yang memahami pembagian tugas. Dalam komunitas semacam itu, setiap orang memiliki peran tertentu; tidak ada satu individu pun yang dapat bertahan hidup sendiri, karena setiap orang memerlukan bantuan dan dukungan satu sama lain.

Von Mises memberikan contoh bahwa pengembangan jaringan hubungan ekonomi global yang rumit merupakan hasil dari liberalisme dan kapitalisme pada abad kesembilan belas. Jaringan ini membuat spesialisasi di berbagai area produksi modern dapat berlangsung bersamaan dengan kemajuan teknologi. Untuk memenuhi segala yang dikonsumsi dan dibutuhkan oleh keluarga seorang pekerja di Inggris, setiap negara di lima benua berkolaborasi. Teh untuk sarapan dihasilkan oleh Jepang atau Srilanka, kopi dipasok oleh Brasil atau Jawa, gula berasal dari Hindia Barat, daging tersedia dari Australia atau Argentina, kapas diperoleh dari Amerika atau Mesir, dan kulit untuk jangat berasal dari India atau Rusia, dan seterusnya.

Dalam pertukaran barang-barang tersebut, produk-produk dari Inggris menyebar ke penjuru dunia, bahkan hingga ke desa-desa dan wilayah pertanian yang paling terpencil dan jauh. Perkembangan ini terjadi dan adalah mungkin hanya karena, melalui keunggulan prinsip-prinsip liberal, masyarakat tidak lagi menganggap serius kemungkinan terjadinya perang besar. Pada zaman keemasan

liberalisme, perang antara negara-negara liberal dianggap usai, telah berlalu. Dan ini hanya dimungkinkan dalam zona negara-negara demokrasi liberal, sebab kebijakan luar negeri negara-negara demokrasi itu cinta damai dan cenderung mencari keuntungan satu sama lain.

Dalam literatur politik/hubungan internasional, teori perdamaian demokratik ini biasa disebut sebagai teori perdamaian diadik (*dyadic peace theory*) dan dapat disederhanakan penjelasannya melalui dua model dari unsur demokrasi, yakni model normatif dan hambatan lembaga. Menurut model normatif (budaya & norma demokrasi) masyarakat demokratis secara inheren diyakini menentang perang karena warga tidak akan memilih untuk mengirim diri mereka sendiri ke medan perang. Selain itu, demokrasi juga mempunyai kesamaan norma-norma persaingan politik yang dibatasi dan resolusi damai dalam menyelesaikan konflik; dan norma-norma internal demokrasi ini diperluas pada hubungan antar negara-negara demokrasi. Negara-negara demokrasi juga mendukung norma-norma penyelesaian konflik secara damai dalam hubungan dengan negara-negara nondemokrasi, karena mereka takut tereksplorasi.⁴⁸

Sementara itu, model hambatan lembaga lebih menekankan pada *checks and balances*, penyebaran kekuasaan dan peran pers bebas. Lembaga-lembaga ini menghalangi para pemimpin politik untuk mengambil tindakan militer sepihak, menjamin debat publik terbuka dan menuntut para pemimpin untuk mendapatkan dukungan publik luas sebelum mengambil kebijakan yang berisiko. Akibatnya, para pemimpin memutuskan untuk menghindari risiko sehubungan dengan

⁴⁸ Jack S. Levy, "Perang dan Perdamaian," dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons (eds.), *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media, Oktober 2013, h. 741.

keputusan untuk perang dan dapat mengambil tindakan tegas hanya dalam menanggapi ancaman langsung yang serius.⁴⁹

Melalui dua model unsur demokrasi ini, sejumlah teoretikus, meski tidak banyak, yang meyakini bahwa dengan mekanisme demokrasi yang demikian semestinya teori perdamaian demokratik bisa menghasilkan varian teori lain, yakni teori perdamaian monadik (*monadic peace theory*). Teori ini menjelaskan bahwa negara demokrasi secara umum bersikap damai, bukan hanya kepada negara yang menganut demokrasi, tetapi juga kepada negara-negara yang tidak menerapkan demokrasi. Ada beberapa studi yang menemukan sedikit dari efek teori monadik. Harald Müller dan Jonas Wolff (2004), misalnya, dalam artikelnya menyebutkan "bahwa negara-negara demokrasi rata-rata, mungkin sedikit, tapi tidak kuat, kurang suka berperang dibandingkan dengan negara non-demokrasi." Selain itu Müller dan Wolff juga meyakini semestinya demokrasi juga bisa membuat negara demokrasi berlaku damai terhadap negara non-demokrasi.⁵⁰ Sebelumnya Zeev Maoz dan Bruce Russett juga pernah memberikan sebuah pembuktian monadik bahwa sesama demokrasi akan menjadi lebih pasifis terhadap seluruh negara (bukan sekadar terhadap sesama demokrasi lainnya).⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 742.

⁵⁰ Harald Müller dan Jonas Wolff, "Dyadic Democratic Peace Strikes Back: Reconstructing the Social Constructivist Approach After the Monadic Renaissance" Makalah ini disiapkan untuk presentasi pada Konferensi Hubungan Internasional Pan-Eropa ke-5 di Den Haag, pada 9-11 September 2004 – artikel bisa diunduh dalam situs: <https://web.archive.org/web/20060625034003/http://www.sgir.org/conference2004/papers/Mueller%20Wolff%20-%20Dyadic%20Democratic%20Peace%20Strikes%20Back.pdf> (diakses tanggal 16 September 2020).

⁵¹ Zeev Maoz dan Bruce M. Russett, "Normative and Structural Causes of Democratic Peace, 1946–1986," *American Political Science Review*, Vol. 87, No. 3 (September, 1993), h. 624–638.

2. Konstruktivisme

Konstruktivisme berasal dari teori sosial; Keyakinan bahwa manusia melihat dunia melalui perspektif yang dibangun secara sosial adalah penting.⁵²

Lebih jauh, teori ini didasarkan pada gagasan bahwa “Pengetahuan yang dihasilkan melalui sejarah dan terkait dengan budaya memberikan kesempatan kepada individu untuk menciptakan dan memberikan arti pada kenyataan”.⁵³

Realitas hubungan internasional pun demikian. Konstruktivisme sosial melihat keseluruhan disiplin Hubungan Internasional sebagai konstruksi sosial. Tekanannya adalah dimensi sosial dari hubungan internasional.

Konstruktivisme yang berlabuh di dermaga HI pada dekade 1980an, menggambarkan keadaan dunia sosial yang selalu berubah, bergantung, dan dipengaruhi oleh budaya. Hal ini memberikan dampak signifikan pada cara kita memahami pengetahuan, termasuk dalam konteks pengetahuan ilmiah, serta cara kita mencapainya. Oleh karena itu, konstruktivisme memiliki kemampuan untuk merubah cara kita memahami realitas sosial dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu hubungan internasional. Ia menekankan interaksi timbal balik antara lingkungan dan pengetahuan manusia serta mengemukakan pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah sesuatu yang saling terkait.⁵⁴

Meskipun konstruktivisme memiliki banyak varian, namun semua benang merah konstruktivisme berkumpul pada ontologi yang menggambarkan dunia

⁵² R Palan, “A World of their making: an evaluation of the constructivist critique in International Relations”, *Review of International Relations*, 26 (2000), h. 576-577.

⁵³ M Barnett, “Social Constructivism”, dalam John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford and New York: Oxford University Press, 2011, h. 156.

⁵⁴ Emmanuel Adler, “Konstruktivisme dan Hubungan Internasional”, dalam Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons (eds.), *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2013, h. 193.

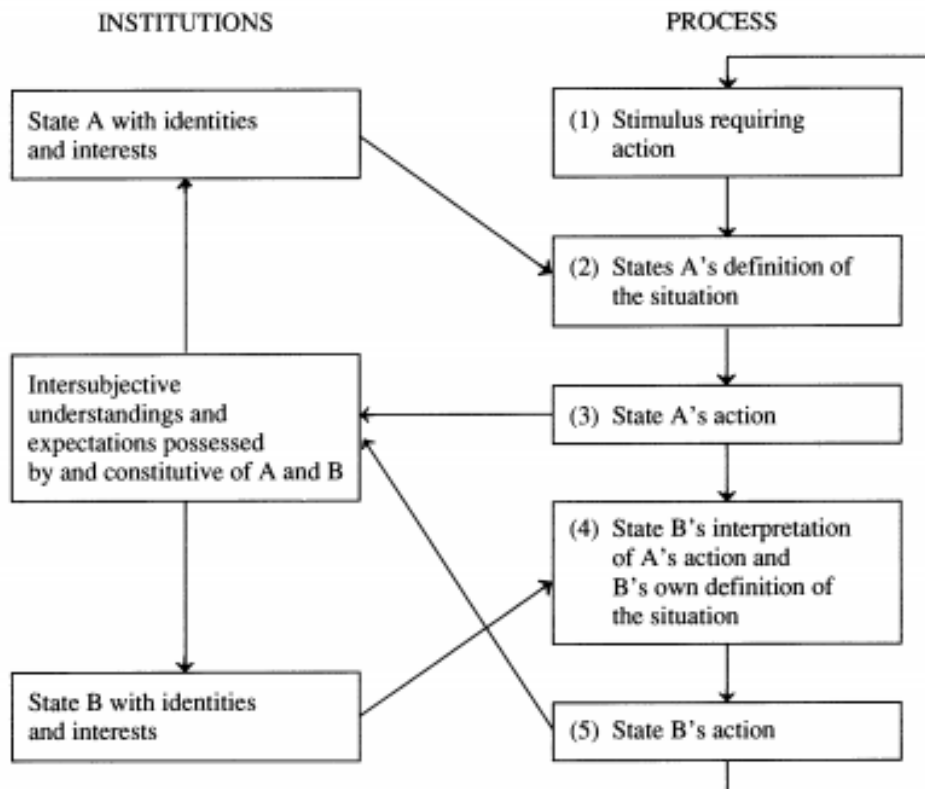
sosial sebagai struktur dan proses intersubyektif dan kolektif yang bermakna. Di dunia ini, bahan-bahan material hanya mendapatkan arti untuk aktivitas manusia melalui kerangka pengetahuan kolektif di mana mereka berada. Dari sini, Emmanuel Adler mencatat beberapa implikasi penting yang muncul.⁵⁵ Pertama, dunia sosial diciptakan dari pemahaman intersubyektif, pengetahuan subyektif dan obyek-obyek material. Dunia yang dilihat kaum konstruktivis, oleh karena itu, tidak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan dunia yang dilihat oleh kaum realis atau kaum liberal. Tetapi ia adalah dunia yang lebih luas, lebih *contingent*, lebih tak terduga, lebih mengejutkan dan diberkahi dengan banyak kemungkinan. Kedua, fakta sosial, yang adalah fakta hanya dengan kesepakatan manusia dan yang mencakup sebagian besar fakta yang dikaji dalam HI, berbeda dari batu dan bunga, karena, tidak seperti yang disebut terakhir, keberadaan mereka tergantung pada kesadaran manusia dan bahasa. Dengan kata lain, fakta sosial, dengan jalan pemahaman kolektif dan wacana, tergantung pada ikatan pengetahuan kolektif pada realitas fisik. Sebagai contoh, ketika kita mengklasifikasikan dan menyebut sebagian orang sebagai ‘*self*’ dan kepada orang lain sebagai ‘*the other*’, maka muncul gagasan tentang apa yang ada dalam *interest* ‘kita’, sebagai lawan *interest* ‘orang lain’. Ketiga, meskipun orang mengusung pengetahuan, ide, dan makna di kepala mereka – di mana lagi mereka akan berada? – mereka juga mengetahui, berpikir dan merasa hanya dalam konteks dan dengan mengacu pada pemahaman kolektif atau intersubyektif, termasuk aturan dan Bahasa. Dengan kata lain, dari konteks atau latar belakang

⁵⁵ *Ibid.*, h. 203-204.

inilah orang meminjam pemahaman epistemik, normatif, dan ideologis, aturan dan wacana yang membuat individu menjadi agen yang memungkinkan mereka bertindak atas dunia yang disitu mereka menemukan diri mereka. Terakhir, konstruktivis (kecuali konstruktivis radikal – sebut saja posmodernisme) semua menganggap pembentukan bersama agen dan struktur menjadi bagian dari ontologi konstruktivisme.

Di sini, bagi konstruktivis, perilaku agen sangat penting dalam memahami dunia – agen membentuk fakta sosial melalui ide, pengetahuan atau pun ideologi yang tertanam di dalam dirinya. Konstruktivis terkemuka Alexander Wendt menulis bahwa perilaku agen dibentuk oleh pengalamannya selama proses sosialisasi di dalam institusi sistem internasional. Jika di satu sisi, negara A dianggap kooperatif oleh negara B, maka negara B kemungkinan besar akan bertindak kooperatif dengan negara A. Di sisi lain, jika negara A dianggap mengancam oleh negara B, maka negara B tidak akan bekerja sama dengan negara A. Dalam Gambar I.2, Wendt menjelaskan bahwa proses sosialisasi ini terus berubah, tergantung pada perubahan identitas agen, mengubah persepsi, dan, selanjutnya, interaksi agen.⁵⁶ Itu artinya, pada tingkat sistemik, interaksi bilateral dan multilateral menciptakan seperangkat norma sosial yang menentukan kecenderungan umum sistem terhadap konflik atau kerjasama.

⁵⁶ Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), h. 406.



Gambar I.2:
Formula Alexander Wendt Soal Proses Sosialisasi dalam Institusi⁵⁷

Meskipun teori perdamaian demokratis secara empiris reflektif dan itu bisa ditunjukkan melalui kebijakan luar negeri negara demokrasi yang cinta damai, pendukungnya tetap mendapat banyak kritik karena dinilai salah dalam mengidentifikasi penyebab perdamaian demokratis. Para sarjana politik internasional beraliran realis menjadi pengkritik paling gigih atas hipotesis perdamaian demokratis. Argumen tandingan paling umum yang dikemukakan oleh kalangan realis mengaitkan perdamaian antara demokrasi dengan pembagian dunia di era Perang Dingin ke dalam blok demokrasi dan komunis.

⁵⁷ *Ibid.*

Demi untuk menyeimbangkan ancaman komunisme itulah, sebagaimana argumen kalangan realis, demokrasi secara alami menjalin hubungan yang kooperatif dan bersahabat satu sama lain. Berdasarkan penilaian ini, perdamaian demokratis dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan keseimbangan kekuatan yang melekat pada struktur sistem internasional yang anarkis dan bukan kondisi yang dihasilkan oleh demokrasi *per se*.⁵⁸

Pada awalnya, konstruktivisme mendukung pemahaman realis tentang perdamaian demokratis. Sikap kedua negara adidaya selama Perang Dingin memang telah mempercepat pembagian dunia menjadi dua blok antagonis. Untuk sebagian besar, *zero-sum game* yang dihasilkan dari persaingan kekuatan besar telah memaksa negara pengekor untuk menjalin hubungan kooperatif dengan salah satu kekuatan besar.⁵⁹ Perhatian utama negara, menurut realis dan mungkin konstruktivis, adalah kecenderungan predator dari dua negara dominan itu. Identitas demokrasi dan kerja sama mereka dengan pemerintah sejenis, kemudian, dapat dibungkus dalam identitas kekuasaan murni yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, yang tidak dapat dikaitkan dengan kondisi sosial yang diciptakan oleh rezim demokrasi. Dalam konteks ini Konstruktivisme seolah-olah mendukung perspektif realisme tentang perdamaian demokratis dengan menempatkan perdamaian demokratis sementara dalam konteks dialogis dan historis.

⁵⁸ James Lee Ray, "Does Democracy Cause Peace," *Annual Review of Political Science* 1 (1998), h. 37-38.

⁵⁹ Pembahasan yang sangat baik tentang ini dikupas oleh Henry S. Farber dan Joanne Gowa, "Common Interests or Common Politics? Reinterpreting the Democratic Peace", *The Journal of Politics*, Vol. 59, No. 2 (May, 1997), h. 393-417; Lihat juga Henry S. Farber dan Joanne Gowa, "Politics and Peace", *International Security*, Vol. 20, No. 2 (Fall, 1995).

Namun demikian, pendekatan konstruktivis terhadap hubungan internasional, bagaimanapun, memungkinkan penjelasan yang lebih fleksibel tentang perdamaian daripada determinisme ketat realisme. Beberapa akademisi mengkritik realis karena mengabaikan pengaruh demokrasi terhadap perdamaian demokratis, dengan menyatakan bahwa posisi realis tidak dapat menjelaskan kurangnya konfrontasi militer antara demokrasi sejak akhir Perang Dingin. Tidak seperti realisme, model berbasis konstruktivisme menawarkan respons yang meyakinkan terhadap argumen tandingan perdamaian demokratis. Ketahanan lembaga-lembaga internasional yang berorientasi pada demokrasi setelah Perang Dingin ditambah dengan identifikasi massal negara-negara dengan demokrasi dan tidak adanya ideologi alternatif telah berkontribusi pada proses sosialisasi yang mempromosikan kerjasama demokratis. Identitas negara dan kekuatan struktural sistem internasional selalu berubah dan mempengaruhi perilaku kooperatif atau konflikual dari interaksi negara. Jika para realis mengklaim bahwa pertimbangan politik riil mengharuskan kerjasama demokratis, para konstruktivis akan menjawab bahwa realitas sosial politik internasional yang dinamis membuat hubungan semacam itu tidak kekal.

Sejumlah teoretikus mungkin akan menemukan literatur yang menunjukkan bahwa konstruktivisme mengakomodasi gagasan bahwa perdamaian demokratis adalah produk dari identitas demokratis dan bukan keseimbangan sederhana dari penjelasan politik kekuasaan. Identitas suatu negara adalah produk dari kondisi internal yang dihasilkan oleh tatanan internalnya dan interaksinya dengan negara luar. Dengan kata lain, identitas dibangun secara kompleks di

tingkat nasional ketika para pemimpin harus menyeimbangkan preferensi konstituen dengan interpretasi mereka terhadap niat dan kekuatan negara lain.⁶⁰

Hal itu bisa dilihat saat terjadinya kerja sama demokratis selama Perang Dingin. Dalam masyarakat demokratis, penerimaan ide-ide demokrasi membelokkan persepsi pemimpin mereka terhadap demokrasi lain sebagai sekutu 'alami' selama Perang Dingin. Demokrasi pada umumnya memiliki nilai yang sama dan proses sosialisasinya saat Perang Dingin telah memperkuat gagasan ini. Namun secara abstrak, klaim ini bermasalah. Bentuk tata kelola tidak selalu mendasari sifat hubungan antarnegara. Demokrasi, misalnya, diketahui bersekutu dengan para otokrat selama Perang Dingin untuk melawan ancaman komunis karena identitas bersama dan anti-komunis. Dengan kata sederhana, jenis rezim yang dimiliki oleh suatu negara mempengaruhi kemampuan negara tersebut untuk berinteraksi secara harmonis dengan negara-negara lain dalam tatanan internasional.

Analisis empiris berikutnya dapat kita lihat dalam arena institusi internasional yang dapat mengubah perilaku dan niat negara. Jika, secara hipotetis, Organisasi Perdagangan Dunia dianggap secara luas sebagai lembaga yang eksploitatif dan/atau korup, negara demokrasi yang berpartisipasi dalam lembaga tersebut dapat kembali ke kebijakan ekonomi autarkis atau proteksionis. Jika hipotesis Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyebutkan bahwa saling ketergantungan antar negara mendorong interaksi damai benar, maka perang

⁶⁰ Robert Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, 42 (1988), h. 424.

antara semua negara - termasuk negara demokrasi - lebih mungkin terjadi ketika hubungan ekonomi terputus.⁶¹

Juga tidak sulit untuk membayangkan bahwa persaingan memperebutkan sumber daya penting dan langka seperti air minum dapat memaksa negara demokratis terlibat dalam konflik militer dengan negara demokrasi lain. Atau, jika seseorang menerima argumen Samuel Huntington, ketegangan yang berasal dari perpecahan antar budaya akan menjadi katalisator konflik antarnegara di masa depan, terlepas dari bentuk pemerintahannya. Permusuhan budaya antara Barat dan Islam, menurutnya, meningkatkan kemungkinan konflik antara demokrasi di masing-masing budaya.⁶²

Singkatnya, argumen bahwa negara demokrasi tidak berperang melawan pemerintah serupa memang bisa dibuktikan secara empiris. Namun, secara kualitatif sulit untuk menjelaskan hubungan antara pengaruh abstrak demokrasi dan produk nyata perdamaian. Penjelasan realis terlalu deterministik dan kaku secara struktural, sedangkan perdamaian demokratis terlalu idealis memuji manfaat dari pemerintahan demokratis. Untuk itu, konstruktivisme menawarkan model yang lebih halus untuk menganalisis penyebab dari perdamaian demokratis. Dalam kaitan itu, konstruktivisme rupanya lebih melengkapi pendekatan liberal dalam hubungan internasional. Dalam kasus perdamaian demokratis, konstruktivisme berdiri sendiri di ruang yang memisahkan perdamaian demokratis dan posisi realis.

⁶¹ Robert Keohane, "Theory of World Politics," dalam Robert Keohane (ed.), *Neorealism and its Critics*. New York: Columbia University Press, 1986, h. 197.

⁶² Samuel P Huntington, "The Clash of Civilizations," *Foreign Affairs* 72 (1993), h. 32; Lihat juga buju utuh Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York, Simon & Schuster, 1996.

Dengan demikian, pendekatan konstruktivis terhadap teori perdamaian demokratis mengembangkan gagasan bahwa tidak semua norma positif, oleh karena itu, tidak semua implikasi mengenai demokrasi selalu berarti kerja sama; perbedaan demokratis bisa juga menumbuhkan konflik.⁶³ Ketika sebuah negara diidentifikasi sebagai demokrasi, hal itu dapat menyiratkan niat kooperatif, tetapi bagaimana negara menafsirkan demokrasi itu penting dan bervariasi.⁶⁴ Widmaier menjelaskan bahwa “ketegangan antara demokrasi 'liberal' dan 'sosial' dapat menimbulkan permusuhan dan konflik”, sehingga konflik tidak hanya akan muncul pada garis patahan demokratis-otoriter.⁶⁵

Widmaier mencontohkan pergeseran dalam hubungan India-Amerika Serikat antara 1949 dan 1969. Menurutnya, pergeseran hubungan itu dapat diidentifikasi karena sifat administrasi politik Amerika. Ketika seorang republikan Richard Nixon menjadi Presiden, hubungan ini menjadi sangat bergejolak. Saat itu Amerika memandang India bukan sebagai negara demokrasi yang damai, melainkan sebagai kekuatan asing yang agresif.⁶⁶ Di satu sisi adalah Amerika, Cina dan Pakistan, dan di sisi lain, India dan Uni Soviet. Beberapa peristiwa seperti penempatan kapal induk Angkatan Laut Amerika ke Teluk Benggala dan kendali India atas Pakistan Timur meningkatkan ketegangan. Pada 17 Desember 1971, gencatan senjata diterima. Menanggapi hal ini, Nixon dan Kissinger mengklaim bahwa Soviet, di bawah tekanan Amerika, telah setuju untuk memaksa

⁶³ W. W. Widmaier, “The Democratic Peace Is What States Make of It: A Constructivist Analysis of the US-Indian ‘Near-Miss’ in the 1971 South Asian Crisis”, *European Journal of International Relations*, Vol. 11, No. 3 (2011), h. 435.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 445.

India menerima proposal ini. Sebaliknya, Widmaier juga beranggapan bahwa gencatan senjata diterima karena perhitungan India sendiri.⁶⁷ Widmaier menyimpulkan bahwa, "struktur kelembagaan demokratis tidak menentukan kepentingan negara."⁶⁸ Melemah atau runtuhnya teori perdamaian demokratis terletak pada ketidaksepakatan atas arti kata tersebut; ini telah menyebabkan munculnya perbedaan demokratis. Poin lain adalah bahwa Nixon dan Kissinger, yang mengesampingkan pertimbangan demokratis (opini publik), memfasilitasi proyeksi perselisihan internal, dengan Partai Demokrat, ke arena internasional.⁶⁹ Dan akhirnya, lembaga demokrasi tidak serta merta menciptakan dan menegakkan perdamaian.

Disinilah pentingnya konstruktivisme dalam menjelaskan perdamaian demokrasi. Sebab sekali lagi tidak semua implikasi mengenai demokrasi selalu berarti kerja sama; perbedaan dalam mengartikan demokratis juga bisa menumbuhkan konflik.

Itulah sebab mengapa Indonesia melalui BDF mencoba merapkan strategi berbeda dari promosi demokrasi Amerika yang sifatnya memaksa dan mengedepankan gagasan diadik. Meski memiliki semangat yang sama soal demokrasi dengan Amerika, Indonesia lebih memilih gagasan monadik untuk dikonstruksikan dalam arena BDF. Dengan begitu, BDF tidak dimaksudkan untuk memaksa negara peserta menerapkan demokrasi, melainkan merangkul semua negara (baik demokrasi atau pun non demokrasi) untuk saling belajar dan berdialog membangun norma demokrasi yang bisa disepakati bersama (identitas).

⁶⁷ *Ibid.*, h. 446.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 434.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 448.

BDF dengan begitu diharapkan Indonesia bisa menjadi wadah sosialisasi bagi para pesertanya untuk saling belajar berdemokrasi satu sama lain demi perdamaian demokrasi *per se*.

Dalam kaitan itu, maka menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sangat penting. Sebab dari situ kita akan mengetahui bagaimana para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia mengkonstruksikan demokrasi sebagai *value* dalam mewujudkan perdamaian demokrasi melalui arena Bali Democracy Forum (BDF).

3. Kebijakan Luar Negeri RI

Prinsip-prinsip fundamental dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, khususnya di alinea pertama. Dalam alinea tersebut, dinyatakan bahwa Indonesia meyakini "bahwa pada dasarnya kemerdekaan merupakan hak dari setiap bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan". Indonesia juga meyakini bahwa pembentukan negara ini bertujuan untuk "berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Kedua prinsip ini kemudian menjadi penggerak utama dalam politik luar negeri Indonesia, yang terwujud dalam kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.⁷⁰

⁷⁰ Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. IV, No.II (Desember 2014), h. 17.

Kebijakan luar negeri bebas aktif adalah prinsip yang didasarkan atas perhitungan yang matang. Pada 2 September 1948, Wakil Presiden Indonesia/Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Mohammad Hatta di muka Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, menjelaskan prinsip itu dengan sangat jernih. Dalam penjelasannya, Hatta menyatakan bahwa kebijakan politik Republik Indonesia tidak berpihak pada satu blok atau blok lainnya. Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Republik Indonesia dikenal sebagai bebas dan aktif. Bebas berarti menentukan arah sendiri tanpa pengaruh dari pihak mana pun; aktif menandakan usaha untuk menciptakan perdamaian global dan menjalin persahabatan dengan semua negara.

Dari prinsip itulah Hatta kemudian membuat pertanyaan retorik atas kebijakan luar negeri Indonesia saat itu: Sebagai hasil dari ketegangan politik global yang didominasi oleh konflik antara Amerika dan Rusia, apakah bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya, harus terbatas untuk memilih hanya di antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tidak ada sikap lain yang seharusnya kita ambil dalam mengejar aspirasi kita?⁷¹ Jawaban atas pertanyaan itu juga dikemukakan Hatta secara retorik, “Pemerintah meyakini bahwa posisi yang perlu kita ambil adalah untuk tidak menjadi sasaran dalam persaingan politik global, tetapi kita harus tetap berdiri sebagai subyek yang memiliki hak untuk menentukan pandangan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka

⁷¹ Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang: 1988, h. 13.

secara utuh. Usaha kita harus dibangun di atas prinsip semboyan lama kita: Percaya pada kemampuan diri dan berjuang dengan kekuatan kita sendiri.”⁷²

Walaupun prinsip bebas aktif Hatta itu ditujukan memang untuk merespons situasi Perang Dingin, tetapi seterusnya prinsip itu tetap bisa dijadikan landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Bedanya, di era setelah Soekarno-Hatta, prinsip bebas aktif diterapkan sesuai dengan situasi internasional yang kontekstual. Soeharto, misalnya, memanfaatkan bebas aktif untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Dan setelah Soeharto lengser pada 1998, Habibie yang mengisi masa transisi kemudian membuat terobosan demokratik yang luar biasa. Ia melakukan apa yang disebut oleh Dewi Fortuna Anwar dan Bridget Welsh (2013) sebagai “democracy take-off” - demokrasi lepas landas yang meninggalkan jauh ke belakang warisan sistem otoriter Orde Baru *a la* Suharto.⁷³

Melalui pemerintahan Habibie itulah, upaya demokratisasi terus berlangsung, dan kebijakan luar negeri Indonesia pun mengalami perubahan besar. Kini banyak pemangku kepentingan bisa berpartisipasi dalam pembuatan KLN dibandingkan era rezim Orba. Indonesia pun lalu menjadikan promosi demokrasi sebagai ciri khas kebijakan luar negerinya, terutama di bawah kepemimpinan presiden SBY. Sejak saat itulah, SBY kemudian mengkontruksikan Indonesia sebagai negara beridentitas demokrasi dan kemudian dijadikan olehnya sebagai landasan bagi konsepsi kebijakan luar negeri Indonesia.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Dewi Fortuna Anwar & Bridget Welsh (eds.), *Democracy Take-off?: The B.J. Habibie Period*. Jakarta: PT. Sinar Harapan Persada, 2013; Asrudin Azwar, “Warisan “Democracy Take-Off” Habibie”, *Sindo*, Senin 16 September 2019: h. 4.

Moch Faisal Karim mengatakan bahwa konsep identitas negara itu sangat relevan untuk menjelaskan peran identitas demokrasi dalam KLNI. Oleh karena itu, Faisal menegaskan bahwa menjelaskan konsep identitas negara dalam kerangka konstruktivisme menjadi sangat penting. Menurut konstruktivis sosial, kepentingan negara terutama dibentuk oleh identitas mereka, sedangkan identitas negara itu sendiri dapat berubah.⁷⁴ Dalam pembahasannya tentang perubahan identitas negara, Faisal Karim dengan mengutip Katzenstein (1996) dan Johnston (1998) mengembangkan budaya strategis sebagai konsep yang dapat dipertukarkan dengan identitas negara.⁷⁵ Ia berpendapat bahwa identitas negara biasanya merupakan ciri semi-permanen negara karena berakar pada kepercayaan sosial, politik dan sejarah yang ada dalam masyarakat. Konstruktivis sosial berasumsi bahwa identitas tercipta dari konteks budaya, politik, sejarah dan sosial. Karenanya, identitas negara dipandang sebagai hasil dari budaya politik domestik daripada interaksi sistemik.⁷⁶

Bagi konstruktivis sosial, identitas negara kemungkinan besar akan berubah ketika budaya dan norma politik domestik lama ditinggalkan dan yang baru dianut. Diasumsikan bahwa nilai-nilai tertentu harus ada sebagai landasan pilihan tersebut. Menurut argumen ini, dalam proses demokratisasi, identitas demokratis akan dianut jika budaya politik dalam negeri lebih menyukai demokrasi daripada identitas lain sebagai cara negara untuk menampilkan identitasnya di kancah internasional. Jika argumen ini benar, maka harus ada

⁷⁴ Moch Faisal Karim, "Role Conflict and the Limits of State Identity: the Case of Indonesia in Democracy Promotion", *The Pacific Review*, Vol. 30, No. 3 (2017), h. 387.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

perubahan signifikan dalam budaya politik dalam negeri yang pada akhirnya mendorong para elit politik luar negeri untuk memproyeksikan identitas demokrasi sebagai identitas negara.⁷⁷

Melalui lensa teori peran, identitas negara terutama merupakan perwujudan dari konsepsi peran nasional yang dikonstruksi oleh pembuat kebijakan daripada fungsi interaksi antara negara dan sistem internasional atau budaya politik domestik. Seperti yang didefinisikan oleh Hymans,⁷⁸ konsepsi peran nasional adalah 'pemahaman individu tentang identitas negara - perasaannya tentang apa yang secara alami diperjuangkan oleh bangsa dan seberapa tinggi (berpengaruh-nilla) negara dibandingkan dengan negara lain di arena internasional. Pada mulanya, Holsti memberikan definisi tentang konsep peran nasional sebagai sekadar pandangan 'pembuat kebijakan' mengenai jenis kebijakan umum, komitmen, aturan, serta tindakan yang relevan dengan negara mereka, dan mengenai fungsi-fungsi yang, jika ada, negara mereka perlu melaksanakannya secara berkesinambungan dalam tatanan internasional. Kedua definisi konsepsi peran nasional itu memberikan peran yang lebih besar kepada pembuat kebijakan negara dalam menkonstruksi konsepsi peran nasional yang menjadi tulang punggung identitas negara.⁷⁹

Merujuk konsepsi itu, menjadi terlihat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dipandu oleh dua teori sebelumnya: perdamaian demokrasi dan konstruktivisme. BDF menjadi bukti nyata dari penerapan dua kerangka teori itu

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Jacques E. C. Hymans, *The Psychology of Nuclear Proliferation: Identity, Emotions and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, h. 19 sebagaimana dikutip *Ibid.*

⁷⁹ Kalevi J Holsti, "National role conceptions in the study of foreign policy", *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No. 3 (1970), h. 233–309 sebagaimana dikutip *Ibid.*

di dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia adalah negara beridentitas demokrasi dan dengan identitas itu pula Indonesia kemudian menkonstruksi demokrasi sebagai perangkat di dalam kebijakan luar negerinya dalam mewujudkan perdamaian demokratis.

H. Metodologi Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Dalam tesis ini, pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data yang bukan berbentuk angka, seperti bahasa. Penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk menelusuri cara pandang subjektif seseorang dan bagaimana mereka memberikan arti pada kenyataan sosial yang ada.

Menurut Catherine Cassell dan Gillian Symon, Metode ini fokus pada pengumpulan serta analisis dari tulisan atau ucapan. Selain itu, metode ini juga berupaya menyajikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang konteks yang sedang diteliti oleh peneliti terkait dengan kondisi sosial.⁸⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan untuk pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah riset pustaka. Untuk jenis data, yang diambil adalah data sekunder dari

⁸⁰ Catherine Cassell dan Gillian Symon (eds.), *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: SAGE Publications, 1994, h. 3-4.

sumber-sumber yang relevan seperti jurnal akademik, buku yang memuat hasil penelitian sebelumnya, dokumen, serta media baik cetak maupun daring yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan fokus penelitian tesis ini, metode analisis data yang akan diterapkan adalah deskriptif-analitis. Melalui metode ini, informasi yang ada akan dikumpulkan, diorganisasi, dan dijelaskan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data tersebut. Jika dengan metode deskriptif hanya menggambarkan secara akurat karakteristik suatu keadaan atau fenomena atau untuk menentukan seberapa sering atau menyebarnya suatu fenomena terkait dengan hubungan tertentu antara fenomena dan fenomena lainnya, maka pada metode deskriptif-analitis, tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pengorganisasian data, tetapi juga mencakup analisis serta interpretasi dari data tersebut.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini akan berisi bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang mengungkapkan mengapa BDF perlu diangkat sebagai fokus kajian penelitian, kemudian masalah penelitian yaitu mengenai pertanyaan pokok penelitian, yang berlanjut dengan kerangka analisis untuk mencari tahu sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan dan dianalisis secara sistematis, lalu menguraikan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan di dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga dimasukkan dalam bab ini untuk

membandingkan dengan tesis yang sedang diriset ini. Selanjutnya adalah kerangka teori, yang menjelaskan konsep dan pendekatan yang komprehensif dan efektif untuk dijadikan kerangka berpikir. Bab kerangka teori ini akan berisi tinjauan konseptual, di dalamnya menerangkan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan untuk membedah permasalahan. Setelah itu adalah metodologi penelitian, untuk menjelaskan pedoman penulisan dalam penelitian mulai dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Bali Democracy Forum, mulai dari latar belakang berdirinya BDF, isu yang dibahas dalam BDF, mekanisme BDF, dan tujuan BDF dalam mewujudkan perdamaian demokrasi.

Bab III Bab ini berisi pembahasan. Pembahasan di sini khusus mengupas perhelatan BDF di masa pemerintahan SBY. Bab ini akan memulai kupasannya lebih dulu dengan menjelaskan kebijakan luar negeri SBY dan bagaimana demokrasi dijadikan sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Dari situ akan diketahui mengapa dan untuk tujuan apa BDF dibentuk. Oleh karenanya adalah penting untuk mengupas isi dari agenda demokrasi BDF *per se*. Uraian ini akan melingkupi rentang waktu gelaran BDF dari 2008 sampai dengan 2014.

BAB IV Bab ini lanjutan dari bab sebelumnya. Karena perhelatan BDF tetap diteruskan pada masa pemerintahan Jokowi, maka pembahasan di bab ini khusus mengupas gelaran BDF di masa pemerintahan Jokowi. Bab ini terlebih dahulu mengupas kebijakan luar negeri Jokowi dan bagaimana demokrasi dijadikan sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Dari sini akan diketahui maksud dari Jokowi untuk meneruskan gelaran BDF. Untuk itu adalah penting untuk mengupas isi

dari agenda BDF di masa pemerinntahan Jokowi. Kupasan ini akan melingkupi rentang waktu gelaran BDF dari 2015 hingga tahun 2020.

BAB V Bab ini berisi analisis hasil penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari agenda demokrasi BDF dan apa implikasinya bagi perdamaian demokrasi. Dalam konteks itu, penelitian tesis ini akan menelisik kasus Myanmar sebagai hasil dari perdamaian demokrasi bagi BDF.

BAB VI Bab ini berisi penutup. Isinya menguraikan kesimpulan dari keseluruhan hasil riset dan apa implikasi teori terhadap topik tesis yang diteliti.

